



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



IMPLIKASI CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN INTEGRATED REPORTING PADA BUMN NONKEUANGAN

¹Dini Wahjoe Hapsari, ¹Vennika Qashash, ²Daniel T. H. Manurung

¹Universitas Telkom, Jl. Terusan Buah Batu, Bandung 40257

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama, Jl. Gatot Subroto No.4, Lumajang 67352

Surel: dinihapsari@telkomuniversity.ac.id, dtmanurung@gmail.com

Volume 10
Nomor 3
Halaman 537-549
Malang, Desember 2019
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
12 Oktober 2019
Tanggal Revisi:
12 Desember 2019
Tanggal Diterima:
31 Desember 2019

Kata kunci:

direksi,
integrated reporting,
pelaporan



Abstrak: Implikasi Corporate Governance dalam Pelaksanaan *Integrated Reporting* pada BUMN Nonkeuangan. Penelitian ini berupaya untuk menelaah implikasi *corporate governance* serta keterlibatan aktif personel perusahaan pada pembuatan *integrated reporting*. Metode digunakan adalah regresi data panel pada 64 data perusahaan saham pemerintah nonkeuangan dan terindeks di BEI pada periode 2014-2017. *Corporate governance* pada BUMN nonkeuangan ini telah diterapkan dengan baik. Pilar utama dalam menjalankan kebijakan perusahaan dalam penyusunan pelaporan keuangan adalah direksi. Untuk mempertahankannya, direksi dan komisaris dipilih melalui proses pemilihan yang panjang dan tanpa campur tangan dari pemerintah sebagai pemilik saham terbesar.

Abstract: Corporate Governance Implication in Integrated Reporting Implementation on Non-Financial SOEs. This study seeks to examine the implications of corporate governance and the active involvement of company personnel in making integrated reporting. The method used is panel data regression on 64 non-financial and indexed government stock company data on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2017 period. Corporate governance in this non-financial SOE has been implemented well. The central pillar in carrying out company policy in the preparation of financial reporting is the directors. To maintain it, directors and commissioners are chosen not only through a lengthy selection process and without interference from the government as the largest shareholder.

Mengutip ini sebagai: Hapsari, D. W., Qashash, V., & Manurung, D. T. H. (2019). Implikasi Corporate Governance dalam Pelaksanaan Integrated Reporting pada BUMN Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 537-549. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.31>

Integrated Reporting (IR) diharapkan tidak hanya melaporkan kondisi keuangan, tetapi lebih kepada penyajian laporan keuangan dari seluruh aspek perusahaan. Untuk melihat kondisi perusahaan dari sisi perspektif bisnis, diperlukan laporan yang transparan dan terintegrasi (Benyaminova, Mathews, Langley, & Rieple, 2019; Bouten & Hoozée, 2015; Dillard & Brown, 2013; Lai, Melloni, & Stacchezzini, 2016; Reuter & Messner, 2015; Soyka, 2013). Disamping itu, IR juga harus mengungkapkan proses

bisnis, kinerja perusahaan, tata kelola serta strategi manajemen untuk keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (McNally, Cerbone, & Maroun, 2017). Hal ini dikarenakan perusahaan dituntut untuk membuat laporan keuangan terintegrasi antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Sementara itu, tujuan penerapan *integrated reporting* adalah dapat menambah nilai perusahaan, bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan keputusan, dan model pembaharuan penyajian laporan keuangan

berkelanjutan perusahaan jangka panjang (Ballou, Casey, Grenier, & Heitger, 2012). Menicucci (2018) dan Wulf, Niemöller, & Rentsch (2014) menyatakan bahwa penerapan *integrated reporting* dapat mempengaruhi proses bisnis perusahaan dan mengubah tradisi atau budaya perusahaan. Camilleri (2018) dan Wendy & Higgins (2014) menyatakan bahwa adopsi IR tidak memicu cara radikal atau inovatif dalam mengungkapkan *item*, tetapi lebih merupakan bentuk pelaporan yang secara bertahap dari pelaporan keberlanjutan sebelumnya. Farneti, Casonato, Montecalvo, & Villiers (2019) dan Hsiao & Kelly (2018) menunjukkan bahwa perusahaan yang investornya lebih aktif dalam masalah lingkungan dan sosial dapat menerapkan IR secara lebih konsisten. Pengukuran *integrated reporting* dilakukan dengan menelaah kuantitas *item* yang diungkapkan. Schmidt & Fahlenbrach (2017) dan Subramanian (2015) mengungkapkan adanya kepemilikan institusional dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan pengawasan agar lebih maksimal pada kinerja manajemen. Pengawasan yang baik menunjukkan perusahaan telah menerapkan pengelolaan yang baik dan dapat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan terintegrasi yang hasilnya akan lebih baik sesuai dengan prinsip *Corporate Governance*. Teng, Fuller, & Li (2018) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Para pemilik saham institusi perusahaan-perusahaan di Indonesia ternyata belum sepenuhnya memiliki kesadaran bahwa keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang penting dikarenakan sebagai pertimbangan utama para investor dalam berinvestasi. Kepemilikan saham diukur menggunakan kuantitas saham institusi dibanding total saham.

Direksi merupakan perangkat manajemen dalam menjalankan perusahaan sehingga kuantitas dewan direksi dapat mempengaruhi penerapan *integrated reporting*. Feng, Cummings, & Tweedie (2017) mengungkapkan keberadaan direksi dapat mempengaruhi penerapan *integrated reporting* dan kuantitas direksi dapat membuat kuantitas pengungkapan semakin meningkat. Banyaknya kuantitas dewan direksi mampu meningkatkan kekuatan manajerial dan dapat meningkatkan fokus pada pelaporan karena kuantitas anggota eksekutif di dewan meningkat. Artinya, tingginya kuantitas dewan direksi akan memudahkan manajemen perusahaan dalam penerapan *integrated re-*

porting, serta meningkatkan pengaruh eksternal dengan perusahaan lain. Setiawan, Hapsari, & Wibawa (2018) dan Susilowati, Candrawati, & Afandi (2018) mengungkapkan hasil yang berbeda yaitu kuantitas dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *integrated reporting*.

Komisaris sebagai pengawas kerja manajemen haruslah pihak yang independen yaitu pihak yang bebas dari kepentingan internal perusahaan sehingga dapat menjadi penyeimbang bagi para pemegang sahamnya baik saham mayoritas maupun minoritas. Komisaris independen diharapkan menjadi solusi untuk menurunkan risiko yang dilakukan oleh manajemen terhadap *integrated reporting* (Lock & Seele, 2016). Beberapa peneliti mengungkapkan adanya komisaris independen yang memenuhi syarat minimal dari otoritas keuangan dapat mempengaruhi penerapan *integrated reporting* (Bernardi & Stark, 2018; Ramin & Lew, 2015; Rezaee, 2016). Haji & Anifowose (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting* meskipun kuantitas komisaris independen perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan otoritas keuangan. Masih terdapat perbedaan argumen mengenai komposisi komisaris independen jika dikaitkan dengan *integrated reporting*.

Engelbrecht, Yasseen, & Omarjee (2018) dan Haji & Anifowose (2016) menyatakan peran komite audit adalah pihak internal perusahaan yang menjamin pelaksanaan tata kelola dalam praktik *integrated reporting* di Malaysia. Hasil ini khusus membahas teknis peran komite audit agar aspek-aspek pelaksanaan tata kelola menjadi efektif dalam praktik *integrated reporting*. Hal ini menunjukkan fungsi atau tugas komite audit berdampak positif terhadap penerapan laporan keuangan yang terintegrasi atau disebut *integrated reporting*. Hal ini bertentangan dengan temuan yang mengatakan keberadaan komite audit tidak dapat mempengaruhi penerapan IR karena tidak ditemukan independensi dan keahlian dari mereka. Kılıç & Kuzey (2018) menyatakan dalam penelitiannya fungsi komite audit untuk mengawasi di internal perusahaan memiliki pengaruh dalam penyusunan laporan tahunan dengan menggunakan rerangka *integrated reporting*. Pengukuran menggunakan skor angka dalam bentuk kuantitas total komite audit. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rangkuti, Yuliantoro, & Yefni (2019) yang menyatakan

komite audit tidak mampu mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting*.

Penelitian terkait dengan *corporate governance* dikaitkan dengan penerapan laporan keuangan terintegrasi masih terbilang jarang dilakukan, terlebih penelitian terkait dengan perusahaan yang memiliki saham mayoritas dari pemerintah. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *corporate governance* dengan melihat saham mayoritas yang dimiliki pemerintah serta keberadaan jajaran personel penting pada perusahaan sektor nonkeuangan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah personel penting perusahaan dalam menjalankan fungsinya supaya dapat menerapkan pelaksanaan *integrated reporting*. Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi *corporate governance* dalam pelaksanaan *integrated reporting* pada BUMN Nonkeuangan.

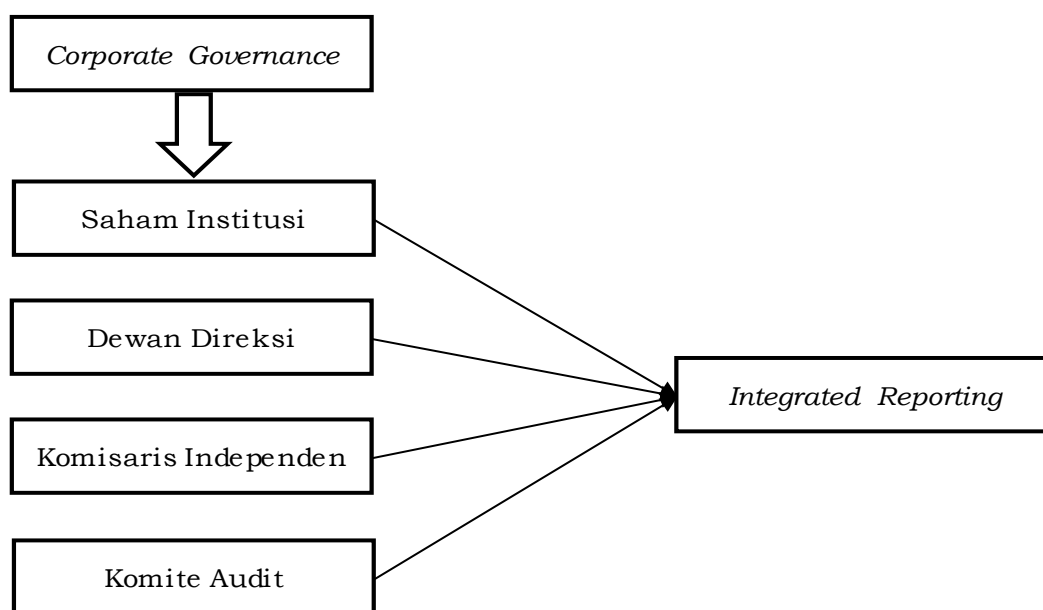
METODE

Corporate governance merupakan suatu pedoman bagi para pemegang saham terhadap pengelolaan dan sistem untuk kepentingan semua pihak perusahaan. *Corporate governance* diukur menggunakan variabel kepemilikan institusi, kuantitas direksi, persentase komisaris independen, serta kuantitas komite audit. Indikator ini merupakan variabel independen. Sementara itu, *integrated reporting* telah mulai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indone-

sia. Konsep *integrated reporting* merupakan suatu laporan yang terintegrasi baik laporan keuangan, pendapat manajemen perusahaan, *governance*, dan remunerasi serta laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability reporting*) yang diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan di dalam pengelolaan. *Integrated reporting* merupakan variabel dependen.

Penelitian deskriptif adalah menentukan karakteristik tertentu dari suatu fenomena dalam setiap variabel meskipun diterapkan pada objek serta waktu yang berbeda. Fokus sampel adalah perusahaan milik pemerintah yang melaporkan laporan tahunan di BEI untuk penelitian 2014 hingga 2017. Seluruh populasi yang digunakan harus memiliki kriteria yang sama sehingga dilakukan pemilihan sampel untuk menentukan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Berdasar kriteria yang ditentukan diperoleh 16 perusahaan BUMN Nonkeuangan dalam 1 tahun periode penelitian dan untuk 4 tahun penelitian sampel penelitian sebanyak 64 perusahaan BUMN.

BUMN nonkeuangan yang menjadi objek penelitian merupakan perusahaan yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan akan melihat kesiapan BUMN yang masuk di BEI dalam penerapan *integrated reporting* secara mandatori. Apakah BUMN nonkeuangan ini dapat menjadi pioneer di Indonesia dalam penerapan *integrated reporting*. Gambar 1 memperlihatkan sejumlah determinan



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	K_INS	D_DIR	Kom_IND	Komite_AUD	IR
Rerata	0,2076	5,9687	0,3751	3,9375	0,7808
Maksimal	0,9014	9	0,6000	7	0,9286
Minimal	0,0015	3	0,1667	2	0,5794
Standar Deviasi	0,1538	1,3329	0,0831	1,1802	0,0749

elemen-elemen *good corporate governance* yang diproyeksikan dapat mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting*.

Berdasarkan Gambar 1, tahap awal adalah melakukan analisis terhadap seluruh variabel yang diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif. Data-data pada analisis tersebut terkait dengan *corporate governance* dan *integrated reporting* sehingga dapat dilakukan perkiraan dengan menggunakan analisis regresi dan melakukan interpretasi. Syarat dilakukannya pengujian regresi adalah setiap data lolos pengujian asumsi klasik, khususnya multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Langkah selanjutnya adalah pengujian regresi pada data panel. Penggunaan regresi disebabkan karena penggunaan data yang berciri *cross section* dan penggunaan periode waktu, sehingga dapat diketahui gejala dan dampak yang terjadi dalam objek penelitian.

Dalam data panel terdapat 3 model yang harus ditentukan model mana yang paling cocok dengan data penelitian. Untuk menentukan 3 model tersebut dilakukan 3 pengujian. Hasil pengujian *chow* digunakan pada aspek penentuan model *common effect* atau *fixed effect*. Dari hasil pengujian pertama apabila menghasilkan model *common effect*, diteruskan dengan pengujian *lagrange* untuk menentukan penggunaan model *common effect* atau *random effect*. Apabila hasilnya berbeda, kedua pengujian tersebut masuk pada pengujian hausman untuk menentukan penggunaan model. Berdasarkan model yang digunakan kita dapat melakukan pengujian atas variabel-variabel dalam penelitian. Pengujian simultan (F) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *integrated reporting*. Pengujian t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh satu per satu variabel independen terhadap *integrated reporting*. Berdasarkan kedua pengujian tersebut, persaa-

maan regresi data panel yang diproyeksikan sebagai berikut:

$$IR = \alpha + \beta_1 K_INS_{it} + \beta_2 D_DIR_{it} + \beta_3 Kom_IND_{it} + \beta_4 Komite_AUD_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

- IR : *Integrated Reporting*
 α : Konstanta
 K_INS : Kepemilikan Insitusional
 D_DIR : Dewan Direksi
 Kom_IND : Komisaris Independen
 Komite_AUD : Komite Audit
 ϵ_{it} : Kesalahan residual (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama yaitu melakukan analisis terhadap hasil statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian. Variabel *corporate governance* yang menggunakan alat pengukuran kepemilikan institusi, kuantitas direksi, persentase komisaris independen dan kuantitas komite audit. *Integrated reporting* diproyeksikan dengan pengukuran *item* atau elemen dalam *integrated reporting*. Hasil perhitungan statistik deskriptif digunakan untuk melakukan analisis nonkeuangan, standar deviasi, serta maksimal dan minimal dari semua variabel. Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan *statistic* deskriptif.

Berdasarkan Tabel 1, *corporate governance* dapat dilihat dari hasil penilaian kepemilikan institusi, kuantitas direksi, persentase kuantitas komisaris independen dan kuantitas komite audit. Kepemilikan institusi memiliki rerata 0,2076 dan standar deviasi 0.1538 yang artinya data tidak bervariasi. Nilai maksimal 0,9014 dipegang oleh Semen Baturaja pada tahun 2015 untuk nilai minimal 0,0015 oleh Kimia Farma pada tahun 2014. Hal ini memperlihatkan kepemilikan institusional perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2015 tetapi tidak diikuti di 2 tahun berikutnya yaitu 2016 dan

Tabel 2. Ringkasan Pengujian Chow – Pengujian Hausman - Pengujian Lagrange

	Prob. Chi-Square	Breusch-Pagan	Hasil
<i>Chow Test</i>	0,5110		<i>Common effect model</i>
<i>Hausman Test</i>	0,8025		<i>Random effect model</i>
<i>Lagrange Test</i>		0,3394	<i>Common effect model</i>

2017. Hal ini dapat disebabkan saham mayoritas dipegang oleh pemerintah, yang sangat dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku.

Kuantitas anggota dewan direksi dalam statistik deskriptif memiliki rerata 5,9687 dengan standar deviasi 1,3329. Hal ini menunjukkan data tidak bervariasi. Hasil pengujian menyatakan kuantitas dewan direksi pada BUMN telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan melalui OJK tahun 2014. Dalam peraturan ini ditentukan kuantitas direksi tiap perusahaan paling sedikit adalah 2 orang. Nilai minimal kuantitas direksi 3 orang terdapat pada Indofarma tahun 2014 sampai 2017 dan Semen Indonesia di tahun 2016. Angka maksimal kuantitas dewan direksi 9 orang terlihat pada Telkom Indonesia di 2016 serta Garuda Indonesia tahun 2017. Arti dari hasil ini adalah semakin besar perusahaan, kuantitas dewan direksi pun semakin banyak. Hal ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya.

Komisaris independen memiliki rerata 0,3751 dan standar deviasi 0,0831 menunjukkan data tidak bervariasi. Angka minimal 0,1667 dimiliki oleh Waskita Karya di 2016. Angka maksimal 0,6000 dipegang oleh Semen Batu Raja selama tahun 2014 sampai dengan 2016. Berdasar tabulasi data dan pengujian, ternyata dari 16 BUMN hanya terdapat 10 BUMN yang memiliki komisaris independen di bawah rerata, sehingga dapat diartikan bahwa komisaris independen untuk BUMN yang masuk di BEI cenderung sedikit. Penyebabnya adalah mayoritas saham dimiliki pemerintah sehingga penentuan komisaris juga masih banyak campur tangan pemerintah yang mengakibatkan turunnya nilai komisaris independen.

Komite audit memiliki rerata 3,9375 dan standar deviasi 1,1802 yang artinya data tidak bervariasi. Angka minimal sebesar 2 dipegang oleh Adhi Karya di 2014 dan Indofarma selama 2015 dan 2016. Angka maksimal sebesar 7 dipegang oleh Krakatau Steel di tahun 2016 serta Telkom Indonesia di tahun 2015. Dari tabulasi data diperoleh hasil dari 16 BUMN terdapat 8 BUMN memi-

liki komite audit diatas rerata, sehingga dapat diartikan kuantitas komite audit pada BUMN non-keuangan tinggi. Sebagai perusahaan dengan mayoritas saham milik pemerintah, BUMN harus menunjukkan kredibilitasnya dengan memiliki kuantitas komite audit sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pada variabel *integrated reporting* ditunjukkan rerata 0,7808 yang berarti elemen pengukurannya tinggi. Nilai standar deviasi 0,0749 menunjukkan nilai tersebut lebih rendah dibanding nonkeuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel *integrated reporting* tahun 2014-2017 adalah tidak bervariasi. Angka maksimal sebesar 0,9286 dipegang PT Timah. Hal ini karena PT Timah mengungkapkan 50 item elemen *integrated reporting* dari total 57 item pada laporan tahunan periode 2017. Angka minimal sebesar 0,5794 dipegang PT Kimia Farma. hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut hanya mengungkapkan 37 item elemen *integrated reporting* dari total 57 item pada laporan tahunan periode 2014. Berdasar data terlihat bahwa pengungkapan *integrated reporting* mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. BUMN yang diharapkan menjadi *pioneer* dalam pelaksanaan *integrated reporting* tampak sudah mulai mempersiapkan dan menerapkan pelaporannya.

Langkah selanjutnya adalah menentukan model yang digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian penentuan model terlihat pada Tabel 2.

Berdasar Tabel 2 hasil *chow test* menunjukkan *prob. chi-square* sebesar 0,5110 sehingga menggunakan *common effect model*. Hasil *hausman test* menunjukkan *prob. chi-square* sebesar 0,8025 artinya menggunakan model *random effect*. Terdapat perbedaan penggunaan model dari dua pengujian sebelumnya, dilanjutkan dengan melakukan pengujian lagrange. Hasil *cross section Breusch-Pagan* sebesar 0,3394. Hasil ini menunjukkan penggunaan model *common effect*.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik yang merupa-

Tabel 3. Pengujian Multikolinearitas

	K_INS	D_DIR	Kom_INS	Komite_AUD
K_INS	1,000000	-0,029197	0,127329	-0,065168
D_DIR	-0,029197	1,000000	-0,120904	0,493146
Kom_INS	0,127329	-0,120904	1,000000	-0,001457
Komite_AUD	-0,065168	0,493146	-0,001457	1,000000

kan syarat penggunaan regresi data panel. Langkah pertama dalam pengujian asumsi klasik adalah dengan melakukan pengujian multikolinearitas untuk melihat model regresi yang akan digunakan. Ditemukan pengaruh antarvariabel bebasnya (Astivia & Kroc, 2019; Can, Schoot, & Hox, 2015). Jika angka korelasi <0,9, maka model regresi dapat digunakan. Hasil pengujian multikolinearitas terlihat pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 nilai variabel independen < 0,9. Berdasar teori yang dijelaskan sebelumnya maka hasil menunjukkan variabel bebas tidak terdapat korelasi.

Pengujian asumsi klasik kedua adalah heteroskedastisitas. Pengujian ini tidak boleh terjadi untuk sebuah model regresi. Nilai heteroskedastisitas dapat melihat probabilitas. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengujian heteroskedastisitas dapat ditelaah pada Tabel 4.

Tabel 4 merepresentasikan bahwa nilai probabilitas setiap variabel >0,05. Artinya, hasil pengujian dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian regresi data panel menggunakan model yang telah dilakukan *test common effect*. Hasil pengujian tersebut dapat ditelaah pada Tabel 5.

Tabel 5 hasil pengujian model *common effect* menampilkan persamaan regresi untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan institusi, kuantitas direksi, persentase komisaris independen, dan kuantitas komite audit terhadap *integrated reporting* untuk BUMN yang terindeks di BEI.

$$IR = 0,552140 + 0,058260 K_INS + 0,021703 D_DIR + 0,079921 Kom_IND + 0,014337 Komite_AUD + \varepsilon$$

Pada Tabel 5 *F-statistic* sebesar 0,000001 memiliki nilai di bawah 0,05 yang artinya *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *integrated reporting*. *Adjusted R-square* sebesar 0,396974 (39,69%) digunakan untuk melihat besar pengaruh *good corporate governance* terhadap *integrated reporting* secara simultan. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai *coefficient* positif yang artinya kepemilikan institusi, kuantitas direksi, proporsi komisaris independen, dan kuantitas komite audit memiliki pengaruh positif dengan *integrated reporting*.

Probabilitas pada kepemilikan institusi 0,11847 dan komisaris independen 0,3107 artinya kepemilikan institusi dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penerapan *integrated reporting*. Nilai probabilitas kuantitas dewan direksi 0,0009 dan komite audit 0,0390 menunjukkan bahwa kuantitas direksi dan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap penerapan *integrated reporting*.

Rerata kuantitas keseluruhan pengungkapan elemen *integrated reporting* pada laporan tahunan BUMN yang masuk di BEI sebesar 77% (lihat Tabel 6), sehingga dapat diartikan bahwa *integrated reporting* pada BUMN yang terindeks di BEI sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan cenderung tinggi. Delapan elemen *integrated reporting* pengungkapan yang ter-

Tabel 4. Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
C	0,0433
K_INS	0,8515
D_DIR	0,9091
Kom_INS	0,9965
Komite_AUD	0,5104

Tabel 5. Hasil Pengujian *Common Effect Model*

Variabel	Koefisien	Strd. Error	t-Stat	Probabilitas
C	0,552140	0,042639	12,94929	0,0000
K_INS	0,058260	0,043406	1,342217	0,1847
D_DIR	0,021703	0,006230	3,483575	0,0009
Kom_IND	0,079921	0,078161	1,022516	0,3107
Komite_AUD	0,014337	0,006789	2,111742	0,0390
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0,435261	Nonkeuangan		0,914024
<i>Adjusted R-squared</i>	0,396974	S.D. Dependen Variabel		0,346133
<i>S.E. of Regression</i>	0,067485	<i>Sum Squared Residual</i>		0,268701
<i>F-statistic</i>	11,36826	<i>Durbin-Watson Statistic</i>		2,020765
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000001			

tinggi adalah pengungkapan tata kelola organisasi (*governance*), kinerja, dan prospek masa depan dengan nilai rerata 91%, 90%,

-
 bahkan sudah menjadi kewajiban BUMN menyajikan elemen-elemen tersebut dalam pelaporan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan. Pengungkapan terendah adalah model bisnis dan dasar pengungkapan elemen. Model bisnis ini membahas sistem dalam perusahaan yang mengubah input menjadi *output* yang dapat berpengaruh pada modal perusahaan. Perubahan ini karena adanya aktivitas yang dijalankan perusahaan (Hermawan, Biduri, Hariyanto, & Ningdiyah, 2019). Rendahnya penerapan elemen model bisnis kemungkinan disebabkan oleh model bisnis merupakan bagian dari dapur perusahaan. Maka, tingkat kerahasiaannya tinggi bagi perusahaan sehingga pengungkapan secara sukarela masih terbatas. Adapun

dasar pengungkapan elemen merupakan pengungkapan informasi perusahaan menentukan data-data yang digunakan dalam laporan dan bagaimana informasi tersebut diukur (Liyundra, Sayekti, & Roziq, 2017; Naynar, Ram, & Maroun, 2018). Informasi yang bersifat sukarela mendorong perusahaan-perusahaan hanya menyajikan informasi yang diperlukan, sehingga mengakibatkan minimnya informasi.

Sebaran data pengungkapan *integrated reporting* selama periode penelitian dari tahun 2014 sampai tahun 2017 (lihat Tabel 7). Pada Tabel 7 terlihat 9 perusahaan memiliki nilai di bawah rerata sebesar 56% sehingga dapat diartikan bahwa belum seluruh BUMN melakukan penerapan *integrated reporting* terutama untuk informasi yang bersifat sukarela.

Rendahnya nilai pengungkapan *integrated reporting* dapat disebabkan pelaporan *integrated reporting* masih bersifat *voluntary*. Perusahaan menilai harus memperbaiki tata

Tabel 6. Pengungkapan Elemen-Elemen *Integrated Reporting*

Elemen	2014	2015	2016	2017	Rerata
Gambaran Perusahaan dan Kondisi Eksternal	79%	74%	75%	76%	76%
Tata Kelola Perusahaan	88%	91%	92%	92%	91%
Karakteristik bisnis	57%	62%	65%	63%	61%
Risiko dan Peluang	79%	85%	81%	81%	82%
Strategi dan Pelaksanaannya	63%	68%	66%	67%	66%
Kinerja Perusahaan	88%	89%	92%	93%	90%
Prospek Ke Depan	90%	91%	94%	94%	92%
Dasar Pengungkapan	56%	52%	65%	65%	59%
Rerata Elemen	75%	77%	79%	79%	77%

Tabel 7. Sebaran Data *Integrated Reporting*

<i>Integrated Reporting</i>	Total	Persentase
Di Atas Rerata 0,7808	7	44%
Di Bawah Rerata 0,7808	9	56%
Total	16	100%

kelola perusahaan agar dapat menyusun *integrated reporting*. Tata kelola dalam perusahaan disebut juga *good corporate governance*, diukur dengan kepemilikan saham institusi yaitu saham mayoritas milik pemerintah, kuantitas direksi diatur dalam Peraturan OJK, komposisi komisaris independen yang dinilai dapat mengawasi kerja direksi dan komite audit dalam melakukan pengawasan. Tabel 8 menunjukkan sebaran data *good corporate governance* selama periode penelitian.

Berdasarkan data Tabel 8 terlihat turunnya nilai kepemilikan institusi dari tahun 2014, 2015, dan 2016, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2017. Artinya, kepemilikan saham pihak institusi menurun. Hal ini dapat diartikan besarnya saham yang dimiliki institusi pemerintahan pada perusahaan tidak serta merta dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk mengungkapkan *integrated reporting*. Para investor institusional belum tentu memberikan perhatian pada perusahaan untuk melakukan pelaporan tahunan yang terintegrasi. Pemilik saham terbesar pemerintah ternyata belum mampu membuat perusahaan memahami pentingnya laporan tahunan terpadu yang berguna juga untuk keberlanjutan perusahaan di masa selanjutnya. Pemerintah masih berharap potensi perusahaan dari sisi keuangan yang sebetulnya lebih fokus pada keberlangsungan perusahaan jangka pendek, tetapi investor lebih cenderung terhadap keberlanjutan nilai perusahaan jangka panjang. Penelitian tentang kepemilikan saham institusi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Elgergeni, Khan, & Kakabadse (2018), yaitu hasil kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh pada *inte-*

grated reporting. Sementara itu, Schmidt & Fahlenbrach (2017) dan Subramanian (2015) menyatakan pentingnya peran kepemilikan institusi di dalam pengawasan dan kinerja manajemen untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang terintegritas sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

Dewan direksi dalam perusahaan mempunyai peranan utama dalam menjalankan tata kelola di perusahaannya yaitu penentuan kebijakan perusahaan serta melakukan pengamanan untuk investor dalam periode waktu ke depan. (Agvei-Boapeah, Ntim, & Fosu, 2019; Garcia-Torea, Fernandez-Feijoo, & Cuesta, 2016). Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 mengatur keberadaan direksi dalam perusahaan merupakan pelaksanaan dalam perusahaan yang memiliki wewenang serta tanggung jawab pada suatu perusahaan publik untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan maksud dan tujuan perusahaan publik seluruh kegiatan baik dalam ataupun luar perusahaan dilakukan berdasar ketentuan anggaran dasar. Pada Tabel 8 ditunjukkan kuantitas dewan direksi mengalami peningkatan selama periode penelitian. Penambahan dewan direksi ini dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kebijakan. Dewan direksi harus mampu menentukan kebijakan yang tepat dan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk penggunaan jangka pendek dan jangka panjang. Tugas direksi dengan adanya *integrated reporting* yaitu adanya pelaporan yang terintegrasi, adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. Faktor lain adalah setiap dewan direksi mempunyai tanggung jawab peker-

Tabel 8. Sebaran Data Good Corporate Governance

	2014	2015	2016	2017
Kepemilikan Institusi	43,75%	31%	19%	25%
Dewan Direksi	25%	25%	69%	69%
Komisaris Independen	38%	44%	44%	38%
Komite Audit	44%	56%	50%	63%

jaan berbeda sehingga masing-masing harus melaporkan tanggung jawabnya. Koordinasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan diperlukan sebagai dasar untuk pelaporan *integrated reporting* yang dapat dijadikan media perusahaan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan *stakeholder*. Penelitian terkait kuantitas direksi ini sejalan dengan penelitian Setia, Abhayawansa, Joshi, & Huynh (2015) yang menyatakan bahwa kuantitas direksi dapat mempengaruhi penerapan *integrated reporting* pada perusahaan. Penelitian Higgins, Stubbs, Tweedie, & McCallum (2019) menyatakan banyaknya kuantitas dewan direksi pada perusahaan mampu meningkatkan kekuatan manajerial dan fokus terhadap pelaporan dikarenakan kuantitas anggota eksekutif meningkat sehingga akan memudahkan penerapan *integrated reporting* perusahaan. Dari temuan terdahulu yang telah disebutkan dan pengujian ini menunjukkan bahwa direksi mampu mempengaruhi penerapan *integrated reporting*, serta kuantitas direksi pada perusahaan mampu meningkatkan kuantitas pengungkapan *integrated reporting*.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas minimal keberadaan komisaris independen 30% dari seluruh kuantitas komisaris. Secara umum mereka melakukan tugas pengawasan atas kebijakan perusahaan, apakah telah diterapkan dan ditaati, baik kebijakan tentang perseroannya maupun apa yang telah dilakukan perseroan, serta memberi pendapat atau saran kepada direksi. Berdasarkan tugasnya komisaris independen hanya mengawasi dewan direksi sebagai pelaksana jalannya manajemen, karenanya komisaris independen tidak terlalu memperhatikan informasi yang sifatnya *voluntary*. Komisaris independen lebih *concern* terhadap informasi yang sifatnya *mandatory*, sehingga tidak mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting*. Meskipun komposisi komisaris independen dalam penelitian ini cenderung tidak mengalami perubahan, hal ini tidak mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting* perusahaan. Keberadaan komisaris independen sebagai pemegang saham diharapkan dapat mewakili kepeilikan saham minoritas. Kuantitas komisaris independen ini lebih kecil dibanding dengan anggota komisaris pemegang saham mayoritas yang menyebabkan pengawasan dari komisaris independen menjadi tidak efektif. Hal ini dapat mengakibatkan

pengungkapan informasi perusahaan tidak dapat tersampaikan kepada *stakeholder* sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *integrated reporting*. Hal ini sama dengan penelitian Hijriah, Subroto, & Nurkholis (2019) dan Liu, Jubb, & Abhayawansa (2019) yang hasilnya menyebutkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *integrated reporting*. Penyebabnya bisa karena hasil rapat komisaris independen lebih membahas kinerja perusahaan yang lebih fokus pada laporan keuangan yang bersifat wajib. Komisaris independen belum melaksanakan fungsinya pada pelaporan yang bersifat *voluntary*.

Komite audit memiliki tugas menyampaikan saran kepada komisaris perusahaan, terutama hal-hal terkait pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan direksi kepada komisaris. Artinya, keberadaan komite audit dapat mendukung perusahaan dalam mempublikasikan *integrated reporting*. Berdasar hasil pengujian menunjukkan keberadaan komite audit merata sudah lebih dari standar minimal yaitu paling sedikit 3 orang. Perusahaan sudah menerapkan peraturan pemerintah yang ditetapkan OJK tahun 2015 melalui Peraturan Nomor 55 yang mengatur keberadaan minimal komite audit adalah tiga orang. Peran komite audit selain diatur dalam Peraturan OJK, juga diatur dalam SK Menteri BUMN tahun 2002 dan UU BUMN 2003 yang menyatakan bahwa komite audit menyampaikan saran kepada komisaris perusahaan untuk seluruh laporan yang disampaikan oleh direksi, melakukan pengawasan, dan mendukung pekerjaan manajemen untuk dapat bekerja lebih baik. Berdasarkan tugasnya komite audit dapat mendukung manajemen untuk mengungkapkan dan meningkatkan pengungkapan pelaporan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan *integrated reporting*. Sejalan dengan penelitian Agyei-Boapeah, Ntim, & Fosu (2019) dan Levillain & Segrestin (2019) bahwa komite audit dapat mempengaruhi laporan tahunan yang menggunakan pola *integrated reporting*. Fungsinya dalam penerapan tata kelola, tugasnya adalah melakukan pengawasan pada kegiatan perusahaan yang diharapkan mampu menurunkan kejadian negatif yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Maka, komite audit diharapkan dapat meminimalisasi *agency problem*. Haji & Anifowose (2016) dan Rivera-Arrubla, Zorio-Grima, & García-Benau (2017) men-

yatakan bahwa peran komite audit adalah pihak internal perusahaan yang menjamin pelaksanaan tata kelola dalam praktik *integrated reporting* di Malaysia. Hasil ini khusus membahas bagaimana peran komite audit agar aspek-aspek pelaksanaan tata kelola menjadi efektif dalam praktik *integrated reporting*. Efektivitas komite audit memperlihatkan bahwa kuantitas komite audit mampu meningkatkan praktik IR. Sementara itu, pendapat Kılıç & Kuzey (2018) dan Lock & Seele (2016) menyatakan pentingnya komite audit sebagai pengawas internal perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan dengan kerangka *integrated reporting*.

Secara keseluruhan tidak seluruh faktor dalam *corporate governance* mampu membuat perusahaan menerapkan *integrated reporting*. Proses penyusunan sampai dengan pelaporan laporan terintegrasi ini dapat dikatakan mutlak menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Oleh karena itu, direksi yang menjadi ujung tombak penanggung jawab laporan keuangan akan berpengaruh pada penerapan *integrated reporting*. Komite audit yang memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan direksi ternyata dapat mempengaruhi penerapan laporan keuangan perusahaan sehingga dua bagian dari *corporate governance* ini akan saling terkait.

Objek penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang pemilik sahamnya mayoritas adalah pemerintah. Akibatnya, perusahaan akan sangat terpengaruh dengan perubahan regulasi dan peran pemerintah dalam menentukan siapa yang akan menjadi komisaris dalam perusahaan. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat independensi. Dapat dipastikan saham institusi untuk perusahaan BUMN bentuknya sudah ditentukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait, menyebabkan saham institusi milik pemerintah tidak mempengaruhi penerapan *integrated reporting*. Siapa yang akan menduduki posisi komisaris ditentukan oleh pemerintah melalui proses dan syarat rekrutmen yang baik. Akan tetapi, karena mayoritas diambil dari sektor pemerintah, beberapa komisaris yang diangkat masih memiliki posisi atau jabatan di tempat lain yang tentunya dapat mengurangi independensi komisaris tempat dia bekerja. Kondisi ini bertentangan dengan teori yang menyatakan komisaris independen harus terbebas dari kepentingan yang lain. Hal ini dapat

menjadi masukan untuk perusahaan di bawah BUMN dalam menentukan komisaris independen haruslah orang yang terbebas atau tidak memiliki kepentingan di tempat lain.

SIMPULAN

Corporate governance pada BUMN nonkeuangan ini telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil kepemilikan institusi, kuantitas direksi dan komite audit, serta keberadaan komisaris independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan *integrated reporting*. Pilar utama dalam menjalankan kebijakan perusahaan dalam penyusunan pelaporan keuangan adalah direksi. Melalui posisinya ini seorang direksi dapat mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting*. Komite audit dalam perusahaan tugasnya adalah memberi saran atas laporan yang dibuat dewan direksi kepada komisaris. Oleh karena itu, apabila laporan dewan direksi sudah baik, komite audit akan memberikan masukan yang positif terhadap komisaris. Sebagai badan usaha milik pemerintah, BUMN telah memenuhi persyaratan OJK yaitu kuantitas direksi dan komite audit. Kepemilikan institusi yang merupakan peran investor dan komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh. Hal ini dapat disebabkan tidak adanya peran penting baik investor maupun komisaris dalam menunjang pengungkapan *integrated reporting* dalam perusahaan. Investor hanya memerlukan laporan tahunan untuk mengetahui kinerja perusahaan terkait dengan investasi yang dilakukan. Komisaris independen pun hanya memiliki fungsi memberikan saran terhadap pengungkapan *integrated reporting* yang terdapat dalam laporan tahunan. Indikator keberadaan direksi dan komite audit tidak selalu diukur menggunakan kuantitas sesuai dengan peraturan OJK. Dapat juga untuk menilai keberadaan direksi dan komite audit dilihat dan dianalisis menggunakan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan atau keahlian yang diperlukan, kuantitas rapat, dan independensi.

BUMN merupakan badan usaha yang kepemilikan saham terbesarnya pemerintah sehingga mudah dipengaruhi regulasi pemerintah. BUMN harus mampu berdiri di tengah seringnya perubahan regulasi yang dilakukan pemerintah dan mengurangi *conflict of interest* yang terjadi dalam tubuh perusahaan. Saham mayoritas yang dimili-

ki pemerintah tidak membuat perusahaan sangat bergantung pada pemerintah, terutama dalam penentuan jajaran direksi dan komisaris seharusnya tidak dipengaruhi oleh birokrasi pemerintah. Direksi dan komisaris terpilih tidak hanya melalui proses pemilihan yang panjang, tapi tanpa adanya campur tangan dan kepentingan dari pemerintah sebagai pemilik saham terbesar. Kementerian terkait dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris harus mampu melepas *conflict of interest*. Seorang direksi harus melepas jabatannya di perusahaan lain. Juga melepas keanggotaannya apabila masih terlibat dalam sebuah partai. Komisaris juga tidak memegang posisi komisaris di perusahaan swasta atau anak perusahaan BUMN lainnya.

Penelitian ini tidak lepas dari banyak kekurangan, khususnya pada aspek indikator pengungkapan. Masih terdapat faktor penyebab lainnya yang dapat digunakan sebagai alat ukur indikator pengungkapan *integrated reporting*, seperti besar kecilnya perusahaan yang menggunakan total aktiva. Selain itu, penelitian masa mendatang dapat memasukkan faktor eksternal perusahaan, yaitu auditor eksternal. Opini yang dikeluarkan auditor eksternal dapat mempengaruhi *integrated reporting* karena setiap opini dapat berakibat keterkaitan investor terhadap perusahaan. Usulan lainnya bagi penelitian masa mendatang adalah penggunaan variabel yang lebih teknis seperti *corporate sustainability*, ukuran perusahaan, dan *capital market* sehingga dapat mengetahui pemahaman dan pentingnya pelaksanaan *integrated reporting* bagi perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agyei-Boapeah, H., Ntim, C. G., & Fosu, S. (2019). Governance Structures and the Compensation of Powerful Corporate Leaders in Financial Firms during M&As. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 37, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100285>
- Astivia, O. L. O., & Kroc, E. (2019). Centering in Multiple Regression Does Not Always Reduce Multicollinearity: How to Tell When Your Estimates Will Not Benefit From Centering? *Educational and Psychological Measurement*, 79(5), 813-826. <https://doi.org/10.1177/0013164418817801>
- Ballou, B., Casey, R. J., Grenier, J. H., & Heitger, D. L. (2012). Exploring the Strategic Integration of Sustainability Initiatives: Opportunities for Accounting Research. *Accounting Horizons*, 26(2), 265-288. <https://doi.org/10.2308/acch-50088>
- Benyaminova, A., Mathews, M., Langley, P., & Rieple, A. (2019). The Impact of Changes in Stakeholder Salience on Corporate Social Responsibility Activities in Russian Energy Firms: A Contribution to the Divergence/Convergence Debate. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(6), 1222-1234. <https://doi.org/10.1002/csr.1743>
- Bernardi, C., & Stark, A. W. (2018). Environmental, Social and Governance Disclosure, Integrated Reporting, and the Accuracy of Analyst Forecasts. *The British Accounting Review*, 50(1), 16-31. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.001>
- Bouten, L., & Hoozée, S. (2015). Challenges in Sustainability and Integrated Reporting. *Issues in Accounting Education*, 30(4), 373-381. <https://doi.org/10.2308/iace-51093>
- Camilleri, M. (2018). Theoretical Insights on Integrated Reporting: The Inclusion of Non-Financial Capitals in Corporate Disclosures. *Corporate Communications: An International Journal*, 23(4), 567-581. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-01-2018-0016>
- Can, S., Schoot, R. V. D., & Hox, J. (2015). Collinear Latent Variables in Multilevel Confirmatory Factor Analysis: A Comparison of Maximum Likelihood and Bayesian Estimations. *Educational and Psychological Measurement*, 75(3), 406-427. <https://doi.org/10.1177/0013164414547959>
- Dillard, J., & Brown, J. (2013). Integrated Reporting: On the Need for Broadening Out and Opening Up. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 27(7), 1120-1156. <https://doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216>
- Elgergeni, S., Khan, N., & Kakabadse, N. K. (2018). Firm Ownership Structure Im-

- pact on Corporate Social Responsibility: Evidence from Austerity U.K. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 25(7), 602-618. <https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1450306>
- Engelbrecht, L., Yasseen, Y., & Omarjee, I. (2018). The Role of the Internal Audit Function in Integrated Reporting: A Developing Economy Perspective. *Meditari Accountancy Research*, 36(4), 657-674. <https://doi.org/10.1108/ME-DAR-10-2017-0226>
- Farneti, F., Casonato, F., Montecalvo, M., & Villiers, C. D. (2019). The Influence of Integrated Reporting and Stakeholder Information Needs on the Disclosure of Social Information in a State-Owned Enterprise. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 556-579. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2019-0436>
- Feng, T., Cummings, L., & Tweedie, D. (2017). Exploring Integrated Thinking in Integrated Reporting – An Exploratory Study in Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 18(2), 330-353. <https://doi.org/10.1108/JIC-06-2016-0068>
- Garcia-Torea, N., Fernandez-Feijoo, B., & Cuesta, M. D. L. (2016). Board of Director's Effectiveness and the Stakeholder Perspective of Corporate Governance: Do Effective Boards Promote the Interests of Shareholders and Stakeholders? *BRQ Business Research Quarterly*, 19(4), 246-260. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2016.06.001>
- Haji, A. A., & Anifowose, M. (2016). Audit Committee and Integrated Reporting Practice: Does Internal Assurance Matter? *Managerial Auditing Journal*, 31(8/9), 484-510. <https://doi.org/10.5771/0949-6181-2017-4-484>
- Haji, A. A., & Anifowose, M. (2017). Initial Trends in Corporate Disclosures Following the Introduction of Integrated Reporting Practice in South Africa. *Journal of Intellectual Capital*, 18(2), 373-399. <https://doi.org/10.1108/JIC-01-2016-0020>
- Hermawan, S., Biduri, S., Hariyanto, W., & Ningdiyah, E. (2019). Kualitas Corporate Internet Reporting di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 176-187. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10010>
- Higgins, C., Stubbs, W., Tweedie, D., & McCallum, G. (2019). Journey or Toolbox? Integrated Reporting and Processes of Organisational Change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(6), 1662-1689. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2018-3696>
- Hijriah, A., Subroto, B., & Nurkholis, N. (2019). Penguatan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Market Value Added melalui Modal Intelektual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 295-307. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10017>
- Hsiao, P., & Kelly, M. (2018). Investment Considerations and Impressions of Integrated Reporting: Evidence from Taiwan. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 9(1), 2-28. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2016-0072>
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). Determinants of Forward-Looking Disclosures in Integrated Reporting. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 115-144. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2016-1498>
- Lai, A., Melloni, G., & Stacchezzini, R. (2016). Corporate Sustainable Development: Is "Integrated Reporting" a Legitimation Strategy? *Business Strategy and the Environment*, 25(3), 165-177. <https://doi.org/10.1002/bse.1863>
- Levillain, K., & Segrestin, B. (2019). From primacy to Purpose Commitment: How Emerging Profit-with-Purpose Corporations Open New Corporate Governance Avenues. *European Management Journal*, 37(5), 637-647. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.07.002>
- Liu, Z., Jubb, C., & Abhayawansa, S. (2019). Analysing and Evaluating Integrated Reporting: Insights from Applying a Normative Benchmark. *Journal of Intellectual Capital*, 20(2), 235-263. <https://doi.org/10.1108/JIC-02-2018-0031>
- Liyundra, F., Sayekti, Y., & Roziq, A. (2017). Determinan Timeliness dan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 528-539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7071>
- Lock, I., & Seele, P. (2016). CSR Governance and Departmental Organization: A Typology of Best Practices. *Corporate Governance*, 16(1), 211-230. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2015-0010>
- McNally, M., Cerbone, D., & Maroun, W. (2017). Exploring the Challenges of Preparing an Integrated Report. *Meditari Accountancy Research*, 25(4), 481-

504. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2016-0085>
- Menicucci, E. (2018). Exploring Forward-Looking Information in Integrated Reporting: A Multi-Dimensional Analysis. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(1), 102-121. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2016-0007>
- Naynar, N., Ram, A., & Maroun, W. (2018). Expectation Gap between Preparers and Stakeholders in Integrated Reporting. *Meditari Accountancy Research*, 26(2), 241-262. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-12-2017-0249>
- Ramin, K., & Lew, S. (2015). A Model for Integrated Capital Disclosure and Performance Reporting: Separating Objects from Value. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(1-2), 27-47, <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1042829>
- Rangkuti, H. A., Yuliantoro, H., & Yefni. (2019). Lebih Penting Mana Sustainability Report atau Laba Bagi Perusahaan Perkebunan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 365-378. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10021>
- Reuter, M., & Messner, M. (2015). Lobbying on the Integrated Reporting Framework An Analysis of Comment Letters to the 2011 Discussion Paper of the IIRC. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(3), 365-402. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1289>
- Rivera-Arrubla, Y., Zorio-Grima, A., & García-Benau, M. (2017). Integrated Reports: Disclosure Level and Explanatory Factors. *Social Responsibility Journal*, 13(1), 155-176. <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2016-0033>
- Rezaee, Z. (2016). Business Sustainability Research: A Theoretical and Integrated Perspective. *Journal of Accounting Literature*, 36, 48-64. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2016.05.003>
- Schmidt, C., & Fahlenbrach, R. (2017). Do Exogenous Changes in Passive Institutional Ownership Affect Corporate Governance and Firm Value? *Journal of Financial Economics*, 124(2), 285-306. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.01.005>
- Setia, N., Abhayawansa, S., Joshi, M., & Huynh, A. (2015). Integrated Reporting in South Africa: Some Initial Evidence. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(3), 397-424. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2014-0018>
- Setiawan, D., Hapsari, R. T., & Wibawa, A. (2018). Dampak Karakteristik Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.001>
- Soyka, P. A. (2013). The International Integrated Reporting Toward Better Reporting Framework: Council (IIRC) Integrated Sustainability Reporting and (Way) Beyond Integrated. *Environmental Quality Management*, 23(2), 1-14. <https://doi.org/10.1002/tqem>
- Subramanian, S. (2015). Corporate Governance, Institutional Ownership and Firm Performance in Indian State-owned Enterprises. *Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation*, 11(2), 117-127. <https://doi.org/10.1177/2319510X15576273>
- Susilowati, K. D. S., Candrawati, T., & Afandi, A. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 62-82. <https://doi.org/10.31328/jim.v4i2.560>
- Teng, D., Fuller, D. B., & Li, C. (2018) Institutional Change and Corporate Governance Diversity in China's SOEs. *Asia Pacific Business Review*, 24(3), 273-293/ <https://doi.org/10.1080/13602381.2017.1407125>
- Wendy, S., & Higgins, C. (2014). Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(7), 1068-1089. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1279>
- Wulf, I., Niemöller, J., & Rentzsch, N. (2014). Development Toward Integrated Reporting, and Its Impact on Corporate Governance: A Two-Dimensional Approach to Accounting with Reference to the German Two-Tier System. *Journal of Management Control*, 25(2), 135-164. <https://doi.org/10.1007/s00187-014-0200-z>